

TAJUK

# Tender Maskapai Angkutan Haji

PELAYANAN transportasi haji yang selama ini hanya dikuasai dua maskapai besar, Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines, segera berakhir. Mulai tahun ini, penunjukan langsung terhadap maskapai yang melayani jamaah haji berakhir sudah. Pemerintah akan membuka tender bagi siapa saja maskapai yang memenuhi persyaratan untuk melayani umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk menekan ongkos naik haji (ONH) yang selalu mengalami kenaikan setiap tahun.

Setiap kenaikan ONH, pemerintah selalu beralih di balik alasan kenaikan tarif transportasi udara yang menyerap sekitar separuh dari ONH. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan bersama Komisi VIII DPR RI terus mengevaluasi persoalan tarif transportasi udara yang menjadi biang kenaikan ONH. Hasilnya, kedua lembaga tersebut bersepakat menekan tarif angkutan udara sehingga ONH tak harus dinaikkan, kalau perlu diturunkan.

## Berbagai pertimbangan serius harus menjadi persyaratan tender untuk mendapatkan operator penerbang-an yang memiliki kemampuan.

Untuk menekan tarif tersebut, pemerintah akan membuka kesempatan kepada maskapai lain mencicipi nikmatnya angkutan haji yang telah juru dikuasai maskapai pelat merah dan perusahaan penerbangan Arab Saudi. Kedua maskapai tersebut dinilai terlalu besar mengambil margin keuntungan dari biaya angkutan haji. Untuk tahun ini, asumsi tarif angkutan haji yang dipatok Garuda Indonesia sebesar USD1.764 per jamaah dengan margin keuntungan sebesar 10%. Kalau margin keuntungan tersebut bisa ditekan lagi dan dibarengi langkah efisiensi di pemondokan, hal itu berdampak langsung pada penetapan ONH, setidaknya tak perlu ada kenaikan.

Rencana pemerintah menggelar tender angkutan udara haji disambut antusias sejumlah maskapai swasta nasional. Kita berharap, tender tersebut dapat dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Berbagai pertimbangan serius harus menjadi persyaratan tender untuk mendapatkan operator penerbangan yang memiliki kemampuan, bukan hanya maskapai yang bisa menawarkan tarif yang lebih rendah dari tawaran Garuda Indonesia, tetapi juga harus diperhitungkan kepiawaian dalam urusan pelayanan dan infrastruktur, dalam hal ini pesawat. Buat apa kita mendapatkan harga murah, tetapi pelayanan seadanya?

Dalam setahun terakhir ini, sejumlah maskapai swasta nasional memang sudah menerbangi rute reguler ke Timur Tengah. Satu di antaranya adalah Lion Air yang membuka penerbangan langsung Jakarta-Jeddah sejak November tahun lalu. Melihat fakta itu, kemampuan maskapai swasta nasional tak perlu diragukan. Hanya saja, dalam urusan penerbangan haji itu setiap maskapai harus berkoordinasi dengan pemerintah karena urusan haji tak terlepas dari kontrol langsung pemerintah selaku penyelenggara, dalam hal ini Departemen Agama.

Yang bisa menjegal operator penerbangan domestik dalam angkutan jamaah haji adalah terkait ketentuan armada pesawat. Kita tahu, kepemilikan armada pesawat yang memadai (kapasitas penumpang) untuk mengangkut jamaah haji masih terbatas. Nah, kalau itu masalahnya sudah di luar domain pemerintah. Yang jelas, kita harus beri apresiasi terhadap pemerintah yang melakukan terobosan dalam penyediaan angkutan udara jamaah haji di mana selama ini hanya melalui penunjukan.

Di mata pelaku usaha, tindakan pemerintah tersebut sangat positif dan Garuda Indonesia tak perlu risau. Bukankah sudah kenyang pengalaman menerbangkan jamaah haji selama ini sehingga peluang memenangkan tender tetap terbuka luas. Memang, boleh jadi margin keuntungan bagi operator penerbangan milik negara itu sedikit berkurang, tetapi tak perlu kagok lagi bila dipelototi Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang setiap saat bersiap menarik Garuda Indonesia dalam wilayah tuduhan monopoli usaha.

Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan haji 2009 versi Departemen Agama, masalahnya memang terfokus pada tiga hal, yakni transportasi, pemondokan, dan catering. Kita berharap satu per satu persoalan itu bisa diurai, yang dimulai dari tender penyediaan transportasi udara. Setelah itu, urusan pemondokan dan catering juga bisa diamankan tahun ini. Apalagi Menteri Agama Suryadharma Ali berjanji memperbaiki layanan haji melalui Sistem Manajemen Mutu dengan standar ISO 9001:2008. Kenapa ya bukan dari dulu? (\*)



Mohammad Fajrul Falaakh  
Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Kokohkan sistem presiden-sial. Inilah salah satu kesepakatan penting MPR saat mengubah UUD 1945 pada tahun 1999-2002. Karena itu, secara paradigmatik mestinya dilakukan pemisahan antara fungsi maupun kelembagaan eksekutif dan legislatif. Pemisahan ini menempatkan tiap lembaga pada kedudukan independen dalam memerankan fungsi-fungsi konstitusionalnya.

Namun, pembentukan Sekretariat Gabungan Koalisi (Setgab Koalisi) yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (6/5/2010) justru mengancam desain presidensialisme dan fungsi pengawasan oleh parlemen-legislatif. Secara *de facto* presiden-eksekutif memimpin pemerintahan parlementer dengan mengendalikan mayoritas anggota parlemen melalui Setgab Koalisi. Bukan kebetulan bahwa Setgab Koalisi diorganisasikan menurut model *holding company*, yaitu SBY sebagai "presiden direktur" dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua harian (*chief executive officer*).

### Koalisi Presidensialisme

Unsur presidensialisme yang sudah ada dalam UUD 1945 pramendemen adalah Presiden sekaligus berkedudukan sebagai kepala negara (*head of state*), kepala pemerintahan (*chief executive officer*), dan kepala administratif (*chief administrative officer*) yang menjabat selama waktu yang ditentukan. Saat itu MPR memilih dan mengangkat presiden maupun wakil presiden (wapres). MPR berperan seperti *electoral college* (ke-

# Sistem parlementer meleburkan kekuasaan eksekutif dan legislatif (*fusion of executive and legislative powers*). Setgab Koalisi menjadi arena peleburan itu. Benarkah SBY sedang mendorong amandemen konstitusi untuk menerapkan sistem parlementer bagi Indonesia?

lompok memilih) yang memilih Presiden Amerika Serikat, tetapi banyaknya anggota MPR yang diangkat (tidak dipilih) membatalkan persamaan ini.

Pada 1999-2002 MPR menambakan dua unsur presidensialisme, yaitu presiden dan wapres dipilih sebagai satu pasangan serta tidak dapat dimakzulkan dalam masa jabatannya karena alasan politik (atau karena "melanggar haluan negara"). Presiden dan atau wapres masih dapat diberhentikan oleh MPR, tetapi berdasarkan alasan yang lebih terbatas dan menurut

cara yang ditentukan dalam Pasal 7A-7B UUD 1945.

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, inilah yang terjadi. SBY-Boediono dicalonkan sebagai pasangan presiden-wapres oleh koalisi 24 partai politik. Jusuf Kalla-Wiranto dicalonkan Golkar-Hanura dan Megawati-Prabowo dicalonkan PDIP-Gerindra. SBY-Boediono memenangi pilpres dalam satu putaran dengan menuai 60-an persen suara pemilih. Realisme politik di Indonesia terpaksa mengeksploitasi kondisi multipartai untuk menguatkan presidensialisme.

Meski presiden memiliki legitimasi kuat karena mendapat dukungan langsung dari pemilih, dia berasal dari partai minoritas terbesar (Partai Demokrat/PD, peraih 25% kursi DPR) dengan menggandeng wapres dari kalangan non-partai. Maka enam dari sembilan parpol peraih kursi DPR dimobilisasi untuk berkoalisi di belakang kepresidenan SBY maupun untuk membangun kohesi di parlemen. Koalisi di pemerintahan maupun parlemen sebanyak 60-an persen suara atau 314 kursi DPR (PD-150, PKS-57, PAN-43, PPP-37, dan PKB-27). Kekuatan ini menggelembung jadi 75% (421 kursi) setelah Partai Golkar (107 kursi) bergabung.

Jadilah pengorganisasian dukungan bagi rezim koalisi itu menyempatkan koalisi parlementer, yaitu pimpinan partai terbesar bertindak sebagai *primus inter pares* (perdana menteri) sehingga mengancam fungsi kontrol parlemen. Hanya tiga partai (24% kursi di DPR) yang "tertinggal" berposisi di luar pemerintahan, yaitu PDIP (95 kursi), Gerindra (26), dan Hanura (18). Parlemen memang dapat mewujudkan fungsi pengawasan pada penggunaan hak angket DPR tentang kasus Bank Century, bulan



SI/ARY PRASETYO

Maret yang lalu. Namun, fungsi ini berhasil diperankan oleh pihak "oposisi plus" setelah Golkar, PKS, dan PPP menyebarkan ke pihak oposisi.

Hak angket itu sedang diupayakan berlanjut dengan hak penyatakan pendapat dalam rangka pemakzulan Wapres Boediono. Jumlah pengusul mosi pemakzulan dikabarkan melampaui 100 orang. SBY dan Partai Demokrat gagal "menghukum" mitra koalisi yang bermain mata dengan kelompok oposisi. Pembentukan Setgab Koalisi tampak sebagai langkah praktis untuk menghentikan upaya itu dengan memberi "hadiah" kepada Golkar sebagai Ketua Harian setgab Koalisi.

### Politik Parlementarian

Sebetulnya istilah oposisi maupun koalisi tidak tepat diterapkan pada sistem presidensial karena fungsi dan lembaga eksekutif terpisah dari legislatif. Tiap organ kekuasaan negara memiliki sumber legitimasi sendiri dan cara perekrutan pejabatnya berbeda. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan karena keterpilihannya. Tak seharusnya pula legislatif dijadikan bagian dari pemerintah, misalnya *by remote* dengan mengangkat pimpin-

an aktif parpol sebagai anggota kabinet koalisi. *Remote control* itu semakin kuat melalui Setgab Koalisi.

Sekarang presidensialisme ter-sisa dalam unsur berikut: pasangan presiden-wapres dipilih langsung oleh rakyat (tetapi parpol bukan koalisi parpol memonopoli pencalonannya), presiden-wapres menjabat selama masa jabatan tertentu (*fixed term*), parlemen MPR tak dapat sewaktu-waktu memberhentikan presiden/wapres berdasarkan mosi tak percaya (*vote-of-no-confidence*).

Namun, mayoritas parpol di parlemen juga bersekutu dengan Presiden-eksekutif. Presiden sebagai Ketua Dewan Pembina PD memimpin koalisi enam parpol dan bahkan mengetuai Setgab Koalisi. Artinya, Presiden bukan hanya menjadi pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga bertindak sebagai "pengendali" partai-partai koalisi. Jelas, kesegajaan menguatkan Presiden melalui Setgab Koalisi akan melemahkan fungsi kontrol parlemen. Parlemen seharusnya terpisah dari eksekutif dan mengontrol eksekutif, bukan sebaliknya. Karena jika koalisi dalam multipartai, maka pemerintah dijadikan pendukung pemerintah. Watak "bawahan" parlemen dilemahkan.

Pembentukan Setgab Koalisi merupakan peleburan kekuasaan dalam praktik presidensialisme. Ini mengingatkan kepada sistem parlementer yang tidak mengenal pemisahan kekuasaan eksekutif dari legislatif. Sistem parlementer meleburkan kekuasaan eksekutif dan legislatif (*fusion of executive and legislative powers*). Setgab Koalisi menjadi arena peleburan itu. Benarkah SBY sedang mendorong amandemen konstitusi untuk menerapkan sistem parlementer bagi Indonesia? (\*)

# Parlemen Borjuis, Siapa Perlu?



SI/ARY PRASETYO

pat dilihat, meskipun sejak Reformasi telah tiga kali berlangsung pemilu multipartai, kemilau parlemen sebagai matahari rakyat belum bersinar.

Belum lagi kalau melihat banyaknya anggota parlemen yang masuk penjara akibat korupsi dan kolusi. Kuasa legislasi memungkinkannya anggota parlemen membuat *deal-deal* kepentingan dengan korporat atau negara dalam memuluskan libido ekonominya melalui lahirnya perundangan. Tak terhitung berapa banyak anggota parlemen yang telah ditangkap tangan atau berdasarkan dokumen untuk mendukung diam-diam perusahaan dan konglomerasi. Mulai masalah reklama-si, koneksi pertambangan, alih-fungsi hutan dan ruang publik hingga kebijakan komersialisasi dan privatisasi sumber vital bangsa (telekomunikasi, bahan bakar, air, pulau, moneter dan fiskal). Dengan celah hukum longgar parlemen dapat berbuat seaneak lututnya. Mereka menggunakan anggaran perjalanan dinas, anggaran panitia kerja atau khusus (*ad hoc*), aneka tunjangan, dan keistimewaan fasilitas kelengkapan Dewan lainnya untuk kepentingan yang tidak objektif diperlukan konstitusi.

Sikap heroik parlemen pasca-Reformasi ketika mengusir Presiden Habibie dan Gus Dur tidak dapat dikatakan citra baik DPR. Ini hanya kamufase yang mengaburkan hasrat kuasa yang lebih besar dibandingkan hasrat altruistik, berkorban demi rakyat. Kita pun tahu, tragedi Gus Dur telah melahirkan kesadaran bahwa parlemen sangat mungkin menjadi diktator atas nama demokrasi.

## Citra yang diperlihatkan Parlemen tidak sekuat kualitas demokrasi yang diusungnya. Lebih setahun sejak pemilu April 2009, DPR tidak makin membanggakan dalam mengusung *Geist des Menchen*, semangat rakyat yang kerap pedih sendiri.

orang masih bersifat *quasi*, yaitu apabila tidak memenuhi rasio kecukupan suara akan dilimpahkan kepada nomor urut lebih tinggi. Pada Pemilu 2004 sempat terdengar "prahara Nurul Arifin", memiliki suara lebih banyak dari Ade Kamaruddin tapi malah gagal meluncur ke Senayan. Hanya karena Ade berada di nomor urut satu dan itu jatah pengurus partai.

Namun citra yang diperlihatkan Parlemen tidak sekuat kualitas demokrasi yang diusungnya. Lebih setahun sejak pemilu April 2009, DPR tidak makin membanggakan dalam mengusung *Geist des Menchen*, semangat rakyat yang kerap pedih sendiri. Etika prosedural demokrasi telah dilangkahi oleh peraturan untuk peraturan atau peraturan untuk proyek (*le droit pour le projet*) dan bukan untuk rakyat (*le droit pour le peuple*). Munculnya pansus penegakan hukum, terkait diskriminasi hukum yang diterima Susno Duedji, belum tentu akan memperbaiki citra parlemen yang kembali jatuh pascarekonsiliasi Ical-SBY. Akan ada lagi kelompok kritis tersangkut kail kekuasaan, tinggal tunggu waktu.

Dengan kuasa swaangaran yang dimiliki, DPR telah mengatur

untuk dirinya sendiri anggaran-kesejahteraan. Alokasi anggaran rutin dan operasional bagi DPR hingga Rp2 triliun dan biaya renovasi Gedung Nusantara Senayan sebesar Rp1,8 triliun menjadi bukti mereka tidak sensitif dengan kondisi rakyat yang masih terpukul dalam kemiskinan dan keapaaan. Dengan kekuatan partai koalisi hingga 65% (minus PKS), Partai Demokrat bisa memimpin rekan-rekannya untuk menolak kesewenangan anggaran, tapi tidak dilakukan. Maka jangan salahkan jika rakyat merasa pesimistis dengan masa depan demokrasi berbasis aristokrasi ini.

Eksperimentasi demokrasi telah melahirkan banyak model dan konfigurasi, tetapi belum memberikan bobot pada isi. Jika kita mengingat kembali alasan Charles Louis de Secondat, Baron de la Brede et de Montesquieu tentang pentingnya parlemen, yaitu agar kekuasaan para raja tidak menumpuk dan adanya keseimbangan kekuasaan (*balance of power*), maka kehadiran parlemen terlihat perlu sekali. Namun kejadian hari ini legislatif tidak menjadi lembaga yang mendekati suara rakyat menderita kepada suara Tuhan yang perlu dibela dan dihormati. Dengan kemampuan politik dan kedewasaan informasi yang dimiliki publik, sebenarnya publik selama ini telah mengadvokasi dirinya sendiri dari kesewenangan penguasa-pengusaha.

Maka ketergantungan pada parlemen, termasuk membiayai kehidupan anggota Dewan yang jauh dari cangkup, bisa ditangkis. Caranya, bakalilah sebuah parlemen yang fakir, yang benar-benar memahami bahwa anggota parlemen adalah advokat bagi rakyat. Ia paham sejak awal tidak akan dibekali fasilitas dan uang yang menghijaukan mata dan membuat iri tetangga. Menjadi anggota Dewan berarti berjanji dengan komitmen, pengetahuan, dan talenta altruistiknya untuk membangun demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Rakyat harus melakukan referendum jika anggota parlemen akan diberi privilese sedemikian mewah seperti saat ini karena rakyat juga hidup dengan bekerja dan bukan berleha-leha.

Jika tidak bisa dilakukan itu semua, sungguh kita tidak memerlukan parlemen. (\*)

**SEPUTAR INDONESIA**

**Pemimpin Umum:** Hary Tanoesoedibjo  
**Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan:** Syafril Nasution  
**Wakil Pemimpin Perusahaan:** David Fernando Adu  
**Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab:** Sururi Alfauzy

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Nevy AN Hetharia, Pung Purwanto  
**Redaktur Pelaksana:** Djaika Susila, Titis Widyatmoko  
**Wakil Redaktur Pelaksana:** Alex Aji Saputra, Dwi Sasongko, Masiron Redaktur: Achmad Faisal Nasution, Abdul Hakim, Alviana Harmayani Masrifah, Andri Cahyono, Army Dian Kurniawan, Azhar Aziz, Boy Iskandar, Danang Arradian, Eka Lesmana Prasetya, Hatim Warabi, Isfari Hikmat, Juni Triyanto, Mohammad Faizal, Nurchoelil Nurwan, Shalikhuddin, Supriyadi, Syahrir Roesyd, Widingingsih, Wuri Hardiastuti, Yani Adyansah, Zen Teguh Triwibowo

**Asisten Redaktur:** Abdul Haris, Abdul Rochim, Agus Warsudi, Agung Nugroho BS, Ahmad Fauzi, Ahmad Senoadi, Ainun Najib, Anton Chrisbiyanto, Aria Yudhistira, Chamad Hojin, Deni Mulyana Samita, Donatus Nador, Edi Purwanto, Estu Santoso, Fakhur Raziq, Hanna Farhana, Hatta Sujatmin, Hery Kuswahyo, Hermanto, Hendri Irawan, Mar'uf, Maria Christina Malau, Muhammad Yamin, Mubibuddin Kamali, M Iqbal, Nur Iwan Tri Hendrawan, Pughu Hariyanto, Rakhat Baihaqi, Rusman Hidayat Siregar, Sari Pawiatan, Sazili Mustafa, Slamet Parsono, Sudarsono, Sujoni, Suriya Mohamad Said, Sunu Hastoro Fahrurrozi, Suwarno, Taufik Pramugianto, Thomas Pulingan, Titi Sutinah Abridawaty, Untung Subejo, Vitianda Hilba Siregar, Wasib Wibowo, Wahyu Sahala Tua, Wahyono, Yanto Kusdiantono, Yan Muhandarsyah, Yovan Adi Santika

**Reporter:** Adam Prawira, Ahmad Baidowi, Andri Dwi Ananto, Bernadette Lilia Nova, Denny Irawan, Edi Yulianto, Hariyudi, Harley Ikhsan, Hendradi Hapsari, Helmi Firdaus, Helmi Syarif, Herita Endriana, Hermansah, Inda Susanti, Isfari Hikmat, Juni Triyanto, Khollil Rokhman, M Purwadi, Maesarah, Maya Sofia Puspitasari, Megiza, Neneng Zubaidah, Novia Sang Ayu Lestika K, Paito, Pangaran Ahmad Nurdin, Pasi Liberti Mappapa, Rahmat Sahid, Rasasti Syarifet, Rendra Hanggara, Rosmiyati Dewi Kandi, Sri Noviani, Sugeng Wahyudi, Susi Susanti, Syarifudin, Sofian Dwi, Supitjo, Tedy Achmad, Teguh Mahardika, Wahab Firmansyah, Wahyu Argianto, Wisnu Bagus, Zaeal Muttaqin

**Manager Litbang:** Wiendy Hapsari  
**Redaktur Bahasa:** Jaelani Ali Muhammad  
**Koordinator Fotografer:** Aziz Indra

**Fotografer:** Arie Yudhistira, Astra Bonardo, Eko Purwanto, Hasholhan Siahaan, MS Fahmi, Ratman Suratman, Yulianto, Yudhistiro Pranoto

**Manager Artistik:** Wisnu Handoko

**Direktur Sales & Marketing:** Priscilla Diana Airin  
**Deputy Direktur Sales & Marketing:** Marygold Maitimeo  
**Direktur Keuangan dan Umum:** Henry Suparman  
**Direktur Sirkulasi:** Sugeng H. Santoso

**GM Marketing & Communications:** Caecilia Hamzah  
**GM Sirkulasi & Distribusi:** Donny Irawan  
**GM Keuangan:** Ahmad Sugiri  
**GM HRD:** Adyatnaka A Satya

**Display FC:** Rp 88.900/mmk; BW: Rp 58.800/mmk; Spot Color: Rp 68.500/mmk.  
**Halaman 1:** Rp 147.000/mmk; **Halaman 3:** Rp 93.500/mmk;  
**Halaman 5:** Rp 93.500/mmk; **Halaman 7:** Rp 91.500/mmk;  
**Halaman Cover/Lifestyle, Sport, Referensi, Ekonomi & Bisnis:** Rp 105.800/mmk;  
**Creative Ad:** Rp 101.000/mmk; **Center Spread:** Rp 96.500/mmk;  
**Laporan Keuangan/Prospektus/NERACA FC:** Rp 44.800/mmk; BW: Rp 23.800/mmk  
**Sosial/Duka Cita FC:** Rp 77.000/mmk; BW: Rp 33.000/mmk  
**Advertorial FC:** Rp 91.900; BW: Rp 61.800/mmk; Spot Color: Rp 71.600/mmk  
**Iklan Kolom:** Rp 35.000/mmk; **Baris BW:** Rp 39.000/baris.

**Layanan Langganan:** (021) 3911518, Fax: (021) 3929758  
**Iklan Display:** (021) 3915634, Fax: (021) 3927721  
**Iklan Baris/Kolom, Divisi Sirkulasi dan Distribusi:** Gedung Annex; Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19  
 Jakarta Pusat. **Telepon/Fax:** (021) 3914672.  
**E-mail:** redaksi@seputar-indonesia.com, cs@seputar-indonesia.com  
 iklankolom@seputar-indonesia.com; iklanbaris@seputar-indonesia.com

**Penerbit:** PT Media Nusantara Informasi,  
**Percetakan:** PT Media Nusantara Press  
**Bank:** BCA Cabang Wahid Hasyim A/C 478-301152-5,  
**Anggota SPS Nomor 404/2005/1/A/2006, Terbit Tuhjuh Kali Seminggu.**  
**Alamat:** MNC Tower Lt. 22, Jalan Kebon Sirih Raya No. 17-19, Jakarta 10340.  
**Telepon (Hunting):** (021) 3926955, Fax: (021) 3927578,  
**Redaksi:** (021) 3926955, Fax: (021) 3927721

Wartawan Seputar Indonesia selalu dibekali tanda pengenal dan dilarang meminta / menerima apa pun dari narasumber